

Pada Mei 2021 Nilai Tukar Petani di NTT Naik 0,12 Persen



Kupang, mwartapedia.com – Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Mei 2021 didasarkan pada perhitungan NTP dengan tahun dasar 2018 (2018=100) terjadi peningkatan 0,12 persen pada NTP Mei jika dibandingkan dengan NTP April.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Darwis Sitorus, S.Si, M.Si dalam press release yang disampaikan secara live streaming melalui channel youtube Humas BPS NTT, Rabu (02/06/2021).

Darwis menjelaskan, Peningkatan indeks harga ini disebabkan oleh peningkatan harga komoditas tingkat petani

“Penghitungan NTP ini mencakup 5 subsektor, yaitu subsektor padi dan palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan

perikanan,"ungkapnya.

Darwis menjelaskan, Pada bulan Mei, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 94,49 dengan NTP masing-masing sebesar 93,26 dengan rincian sebagai berikut.

"Untuk subsektor tanaman padi-palawija (NTP-P); 106,33 , untuk sub sektor hortikultura (NTP-H); 90,70, untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR); 103,77 , untuk subsektor peternakan (NTP-Pt) dan 92,84 untuk subsektor perikanan (NTPPi),"ungkapnya.

Sedangkan di daerah perdesaan tidak terjadi perubahan harga komoditas konsumsi rumah tangga.,"pungkas Kepala BPS NTT.(ML/IB)

Wagub NTT: Pendapatan Daerah di Tahun 2020 Meningkat 1,23 Persen



Kupang,mwartapedia.com – Wakil Gubernur NTT, Josef Adrianus Nae Soi, menghadiri Rapat Paripurna Ketiga Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021 DPRD Provinsi NTT,

pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2021, dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020, Penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda Provinsi NTT tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2020 dan Pengesahan Empat Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT.

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, didampingi Wakil-wakil Ketua DPPRD Provinsi NTT, masing-masing : Inche D.P. Sayuna, dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti oleh 45 Anggota DPRD Provinsi NTT secara luring maupun daring.

“Pendapatan Daerah yang ditetapkan melalui Perda Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2020, tentang Perubahan APBD TA. 2020, ditargetkan sebesar Rp. 5,837 triliun lebih, dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5,419 triliun lebih, atau 92, 84 persen. Jika dibandingkan dengan pendapatan periode yang sama per 31 Desember 2019, dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 5,354 triliun lebih, maka pendapatan di tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp. 65,842 milyar lebih atau 1,23 persen”, jelas Wagub JNS.

Lebih jauh dalam Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020, Wakil Gubernur, JNS menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTT bersyukur karena di tengah Pandemi Covid-19 dan Pasca Bencana Seroja LKPD Pemerintah Provinsi NTT TA. 2020, mampu menyampaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi dan Permendagri Nomor N0mor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemda. LKPD ini juga secara lengkap telah melalui audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT selama 40 hari kerja, yaitu dari

tanggal 19 Maret s.d. 5 Mei 2021.

“Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas LKPD Provinsi NTT TA. 2020, telah disampaikan pada tanggal 18 Mei 2021 di hadapan Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan tersebut, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), BPK RI secara professional telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan apresiasi tertinggi dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan merupakan opini WTP yang keenam secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi NTT. Pencapaian Opini WTP oleh Pemprov. NTT merupakan wujud nyata komitmen dan kerja keras pemerintah dengan dukungan penuh dari DPRD Provinsi NTT dan semua pihak”, jelas Mantan Anggota Fraksi Golkar DPR RI tersebut.

Lebih jauh Wagub JNS menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi NTT, yang telah memberikan dorongan dan motivasi secara terus menerus kepada pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan mendapatkan opini WTP bukan berarti pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara sempurna. Sejumlah catatan sebagai rekomendasi dari BPK, yang perlu diperhatikan antara lain : Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang belum memadai.

“Berbagai catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, tentunya akan menjadi perhatian serius pemerintah, untuk ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, dan berwibawa, demi kepentingan masyarakat NTT yang kita cintai”, tegas Wagub JNS.

Diakhir dari penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA. 2020, Wagub JNS menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Yang Terhormat untuk mencermati dan membahas laporan tersebut sesuai mekanisme yang ada.

Tampak hadir pada Rapat Paripurna tersebut diantaranya : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Sony Libing, Karo Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Jelamu Ardu Marius, Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Thobias Ngongo Bulu dan Sekretaris Inspektorat Provinsi NTT, Kanisius Mau. (Biro Administrasi Pimpinan/ML/IB)

Petrus Selestinus: Politik Identitas dan Rasisme Adalah Virus Yang Potensial Menghancurkan Kohesivitas Sosial Masyarakat NTT



Kupang, nwartapedia.com – NTT kembali dihebohkan lagi dengan beredarnya sebuah rekaman video di Group WhatsApp atau Media Sosial (Medsos), berisi Ujaran Kebencian yang bermuatan Sara, sehingga berpotensi mengganggu kohesivitas golongan warga Kota Kupang yang heterogen dan toleran.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, S.H kepada media ini, Selasa (01/06/2021).

Petrus mengatakan Rekaman video itu, disebut-sebut berasal dari suara Yeskial Loudoe, Ketua DPRD Kota Kupang, beredar pada Sabtu, tanggal 29 Mei 2021. Terlepas dari asal usul video itu dari siapapun, namun para stakeholders Kota Kupang, harus segera mengambil upaya penyelesaian, secara ke dalam.

“NTT itu punya kearifan lokal, adat istiadat dan kasatuan-kasatuan hukum masyarakat adat beserta hak-hak tradisional warisan leluhur beserta Lembaga Adatnya yang mampu menyelesaikan masalah antar warga masyarakat melalui peran akomodasi dan mediasi, sebagai bagian dari tugas dan kewajiban kita menjaga kohesivitas sosial masyarakat/merawat kebhinekaan,” ungkapnya.

Jangan Remehkan Konflik Sara.

Menurutnya. Konten video yang beredar, potensial merusak

kohesi sosial dan mengancam toleransi masyarakat di NTT berubah menjadi intoleran. Karena itu semua pihak harus menahan diri dan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin, satu dan lain, menghindari penumpang gelap, yang setiap saat bisa memperkeruh situasi.

“Kekuatan persaudaraan dalam semangat toleransi yang tinggi dengan kohesi sosial masyarakat NTT yang kokoh harus dijadikan modal dalam penyelesaian masalah ini. Budaya, Hukum Adat dengan tingkat toleransi yang tinggi di tengah pluralitas masyarakat NTT harus dikedepankan, karena budaya mengikat kita bersatu saling menghargai dalam perbedaan,”kata Petrus.

Petrus menambahkan, Karena itu pendekatan yang soft oleh Walikota Kota, Pimpinan DPRD dan Tokoh Masyarakat Kota Kupang, harus segera dilakukan dengan mengambil peran akomodatif, memediasi, bagi kedua belah pihak pada penyelesaian secara adat orang NTT.

Penyelesaian Secara Bermartabat.

Petrus mengajak Polres Kota, Walikota dan DPRD dan Tokoh Masyarakat Kota Kupang, harus proaktif mengambil langkah cerdas, melokalisir isu ini, jangan biarkan isu ini menjadi bola liar dan ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik. Dorong Yeskial Loudu, Perwakilan Pendemo dan Pihak terkait lainnya, agar selesaikan permasalahan ini, dalam semangat adat dan budaya setempat.

“Jika dengan Adat Budaya setempat tidak terdapat titik temu, maka peran akomodasi selanjutnya melalui Restorative Justice atau Keadilan Restoratif, karena konsep Restorative Justice, juga memiliki karakter dan semangat yang berakar pada adat budaya lokal, hanya mekanismenya yang berbeda dengan Hukum Adat setempat,”ajaknya.

Masih mrnurut Petrus, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, merupakan wujud nyata komitmen negara untuk melindungi

segala warga negara dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Diskriminasi RAS dan Etnis.

Ditambahkan, Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang selalu hidup berdampingan.

“Oleh karena itu UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan tegas melarang dan mengancam dengan pidana penjara bagi setiap orang yang melakukan kejahatan diskriminasi Ras dan Etnis,”kata Petrus.

“Dalam perkembangan selanjutnya soal Sara ini diperkuat lagi dalam ketentuan pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE yang mengancam dengan pidana penjara bagi setiap orang yang menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara.,”Pungkasnya. (ML/IB).

**Pimpinan DPRD Kabupaten
Manggarai Mendukung Pemekaran
Provinsi NTT**



Ruteng, mwartapedia.com – Isu pemekaran provinsi NTT bukanlah isu baru. Isu ini sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Namun isu ini kadang menguat dan menjadi trending topik di tengah publik, tetapi kadang tenggelam dan menjadi seperti mati suri. Namun demikian isu ini tidak pernah benar-benar mati dan hilang, tetapi seperti api dalam sekam, isu pemekaran provinsi NTT sebenarnya terus membara di kalangan masyarakat NTT itu sendiri.

Wilayah yang hendak mekar dari provinsi NTT adalah wilayah kepulauan Flores. Wilayah ini terdiri Sembilan (9) kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata.

Gagasan tentang kepulauan Flores menjadi Provinsi sendiri sebenarnya sudah seumur provinsi NTT itu sendiri, tetapi sampai sejauh ini belum terealisasi. Namun semangat untuk menjadikan Kepulauan Flores menjadi provinsi sendiri tidak pernah hilang. Kelompok masyarakat yang tidak pernah berhenti untuk bermimpi dan berjuang untuk pembentukan provinsi kepulauan Flores ini telah membentuk panitia khusus yang menjadi penggerak utama perjuangan pembentukan provinsi kepulauan Flores. Panitia khusus itu diberi nama panitia persiapan pembentukan provinsi kepulauan Flores (P4KF). Komponen masyarakat yang menggagas P4KF ini adalah Organisasi Pengawasan Rakyat (OPR).

P4KF diketuai oleh Adrianus Jehamat yang juga menjabat sebagai ketua OPR. Dalam dua (2) bulan terakhir, pria yang biasa disapa Adam ini berusaha mengobarkan kembali perjuangan

pembentukan provinsi Kepulauan Flores. Adam membenahi kembali seluruh struktur panitia, mulai dari panitia pusat sampai panitia daerah di Sembilan kabupaten. Setelah usai membenahi struktur, Adam dan kawan-kawan kembali membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di Sembilan kabupaten. Menurut Adam, perjuangan pembentukan provinsi Flores yang sempat menggema lima tahun lalu itu sebenarnya terkandas karena tidak adanya kepastian tentang penentuan calon ibu kota. "Sebab kunci kandasnya perjuangan pembentukan provinsi Flores beberapa tahun sebelumnya adalah penentuan calon ibu kota," katanya. Oleh karena itu, P4KF membangun kembali komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di Sembilan kabupaten dengan meminta pendapat seluruh jajaran pemerintah daerah di Sembilan kabupaten, baik DPRD maupun bupati, tentang lokasi yang dianggap dapat diusulkan untuk menjadi calon ibu kota provinsi Kepulauan Flores.

Pada hari senin, 31 Mei 2021, P4KF memulai langkah awal membangun komunikasi dan kordinasi dengan pemerintah itu dengan beraudensi dengan pimpinan DPRD kabupaten Manggarai di kantor DPRD kabupaten Manggarai. Audensi dibuat di ruangan ketua DPRD karena jumlah peserta yang hadir hanya sembilan orang, yakni empat dari P4KF, tiga dari unsur pimpinan DPRD, dua sekretaris dewan. Pimpinan DPRD yang hadir adalah ketua DPRD, Matias Masir, Ketua Komisi A, Paul Peos, dan ketua Komisi C, Rikard Madu. Sementara itu perwakilan P4KF adalah Ketua umum, Adrianus Jehamat, sekretaris umum, Siprianus Daman, Ketua Korwil P4KF kabupaten Manggarai Timus, Petrus Katas dan Bendahara wilayah P4KF kabupaten Manggarai, Toni Mbukut.

Pimpinan DPRD Manggarai menyambut peserta P4KF dengan hangat. Audensi dimulai dengan kata pembuka oleh Matias Masir, selaku ketua DPRD kabupaten Manggarai. Seusai kata pembuka, politisi partai PAN itu memperisilahkan Adam untuk menyampaikan pengantar diskusi. Poin utama Adam adalah bahwa sebab kunci kandasnya pembentukan provinsi Kepulauan Flores adalah

ketidakpastian tentang calon ibu kota. Adam meminta pendapat DPRD Manggarai berkaitan dengan pandangan tentang lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi calon ibu kota.

Unsur pimpinan DPRD Manggarai pada dasarnya sangat mendukung jika kepulauan Flores mekar dari provinsi NTT dan menjadi provinsi sendiri. Berkaitan dengan calon ibu kota, tentu alangkah bagus kalau dibuat kajian ilmiah terlebih dahulu. "Untuk menentukan calon ibu kota, perlu ada kajian ilmiah yang objektif," kata Paul Peos. Namun kajian ilmiah tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut Masir, DPRD pada dasarnya siap mengbackup dana, tetapi semua pihak perlu berdiskusi bersama tentang nomen klatur yang tepat agar dana dapat dicairkan sehingga bisa mengbackup kegiatan ini, tetapi serentak tidak melanggar regulasi dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, menurut Rikar Madu, poin kuncinya adalah bahwa DPRD Manggarai mendukung pembentukan provinsi Flores dan siap berkordinasi secara koperatif dengan P4KF untuk mewujudkan perjuangan ini. Sambil menanti kajian ilmiah yang objektif, semua unsur pimpinan DPRD yang hadir sepakat bahwa lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi calon ibu kota provinsi kepulauan Flores adalah Mbai. Alasannya adalah karena Mbai terletak di tengah-tengah pulau Flores dan ada informasi bahwa di sana sudah ada 30 hektar lahan yang siap dihibahkan untuk menjadi pusat pemerintahan provinsi Kepulauan Flores nantinya.

Tanggapan positif dari pimpinan DPRD Manggarai ini tentu merupakan asupan energi yang positif bagi para pejuang pembentukan provinsi Kepulauan Flores. Adam selaku ketua umum P4Kf menuturkan bahwa P4KF akan terus bergiat untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unsur pemerintah di Sembilan kabupaten dan dengan semua pihak lain guna terwujudnya pembentukan provinsi kepulauan Flores.

Kontributor: Toni Mbukut.

Gubernur Harapkan Graha PPNI Jadi Pusat Informasi Kesehatan



Kupang, mwartapedia.com – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meresmikan gedung Graha Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, senin (31/5).

Dalam sambutannya, Gubernur VBL memberikan apresiasi dan menyambut gembira kehadiran gedung Graha PPNI NTT tersebut.

“Saya sangat gembira dengan diresmikannya gedung Graha PPNI ini. Karena berarti para perawat di NTT mempunyai markas komando yang baik dan punya fasilitas-fasilitas yang bagus untuk menunjang pelayanan kesehatan di NTT. Kita ingin juga tempat ini menjadi pusat informasi dan pusat pelayanan (kesehatan) kepada masyarakat sampai ke tingkat desa dengan proses digitalisasi yang baik,” jelas Gubernur VBL.

Menurut Gubernur Viktor, digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam dunia modern dewasa ini.

“Hidup dalam dunia modern saat ini pilihan bagi manusia adalah

digitalisasi dari seluruh pekerjaan-pekerjaan kita. Desain digitalisasi untuk seluruh pekerjaan kita adalah bagaimana kita bekerja tanpa harus tubuh atau fisik kita sampai ditempat itu tetapi dengan digitalisasi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang jauh tanpa harus ada ditempat itu. Karna itu saya berharap agar kantor ini adalah sebuah kantor yang pelayanannya digital terutama informasi kesehatan bisa sampai pada tingkat desa,” harap Gubernur Viktor.

Lebih lanjut Gubernur VBL menjelaskan perawat dan tenaga kesehatan lainnya punya peran penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. “Saya sangat bersyukur hari ini dapat hadir disini karena perawat adalah salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menjawab tantangan indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia di NTT bertumbuh jika sektor kesehatan bekerja dengan baik. Jadi seluruh teman-teman yang bekerja pada bidang kesehatan sangat menolong NTT untuk tidak lagi dipermalukan secara nasional dalam bidang kesehatan. Maka dari itu kita semua yang berada pada bidang kesehatan mempunyai peran yang sangat penting,” ungkap pria asal Semau tersebut.

“Saya terus mendorong seluruh tenaga kesehatan di NTT untuk serius memikirkan masalah kesehatan khususnya masalah stunting serta kematian ibu dan anak karena ini sangat memprihatinkan. Permasalahan stunting ini diakibatkan karena ketidaktahuan dari masyarakat mengenai perawatan yang baik saat mengandung dan keharusan mengkonsumsi makanan yang baik pada masa pertumbuhan bayi. Karena itu saya mengharapkan kepada para perawat harus menjadi garda terdepan agar mengajak para ibu-ibu muda untuk mengedukasi mereka cara merawat dirinya dan bayi yang dikandung dengan baik dan benar,” lanjut Gubernur Viktor.

Di akhir arahnya Gubernur menjelaskan perawat adalah profesi yang mulia.

“Dari tempat ini saya menyampaikan kepada seluruh perawat yang

tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ada di NTT bahwa Bapak Ibu sekalian harus bangga karena Bapak Ibu mempunyai Profesi yang sangat mulia. Saya juga menyampaikan apresiasi dan selamat atas berdirinya Graha PPNI NTT ini. Semoga dari tempat ini muncul manusia-manusia berkualitas dalam melayani masyarakat Indonesia terkhususnya di NTT dalam bidang kesehatan,” tutup Gubernur Viktor.

Selanjutnya Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadilah dalam sambutannya terkait pembangunan Graha PPNI NTT belau menyampaikan apresiasi kepada DPW PPNI NTT.

“Kami dari pengurus DPP PPNI mengapresiasi kerja keras, kerja cerdas dan tuntas dari DPW PPNI NTT yang dalam waktu singkat bisa menghadirkan sebuah karya nyata yaitu sebuah gedung yang kita sebut Graha PPNI NTT karena belum semua provinsi di Indonesia mempunyai gedung seperti ini. Dengan kemauan yang keras sambil terus berkonsultasi kepada DPP PPNI dan berkoordinasi dengan DPD serta DPK seluruh NTT akhirnya gedung ini bisa diluncurkan,” jelas Harif. (Biro Administrasi Pimpinan/ML/IB)

Warga Oksamol Papua Kecam dan Lawan Teroris OPM



Papua, mwartapedia.com – Aksi kelompok teroris OPM di Papua sudah sangat meresahkan. Mereka tak hanya menyerang aparat kepolisian-TNI, namun juga warga sipil. Warga Papua turut membantu upaya menghentikan aksi kelompok teroris tersebut.

Seperti yang dilakukan warga Distrik Oksamol, Papua. Mereka mengecam kekejaman kelompok teroris OPM yang telah melakukan penyerangan terhadap Pos Polisi Oksamol dan menewaskan Briptu Mario Sanoi, Jumat (28/5) lalu.

Ansel yang merupakan Danton Linmas Distrik Oksamol, menegaskan warga menyatakan penolakan kelompok teroris OPM masuk ke wilayahnya, dan juga mengancam melawan kelompok teroris OPM menggunakan senjata tradisional bila memaksa masuk ke lingkungannya.

“Kami masyarakat distrik Oksamol marah atas kejadian tersebut, sehingga kami berkumpul lalu dengan menggunakan senjata tradisional, kami mengejar pelaku pembunuh yang masih berada tidak jauh dari kampung kami,”ujarnya.

“Kami sempat ditembaki oleh mereka namun kami tetap maju untuk mengejar mereka,”lanjut Ansel dalam keterangannya, Senin (31/5).

Ansel menyebut, warga Distrik Oksamol juga bukan kali ini saja menolak keberadaan kelompok teroris OPM dan menegaskan warga Distrik Oksamol tak ada yang terlibat dan menjadi anggota kelompok teroris OPM.

“Saya yakin para pelaku adalah kelompok teroris wilayah Ngalum

Kupel pimpinan Lamek Taplo. Mereka ini bukan masyarakat asli Oksamol melainkan mereka adalah masyarakat dari luar Oksamol yang masuk untuk mengacaukan kami di Distrik Oksamol,”ucapnya.

Bukan hanya itu, Ansel juga menyebutkan keberanian warga Distrik Oksamol pernah mereka tunjukkan saat menolak kehadiran organisasi Papua New Guinea (PNG).

“Kami pernah perang suku dengan masyarakat negara tetangga kami yaitu PNG yang mana mereka mengklaim bahwa wilayah tempat tinggal kami adalah bagian dari negara PNG,” pungkas Ansel. (ML/IB)

Penjelasan Natalia Rusli Soal Makelar Kasus



Jakarta, [mwartapedia.com](https://www.mwartapedia.com) – Natalia Rusli menanggapi berita yang menurutnya HOAX yang di tayangkan oleh Alvin Lim tentang pertemuan-nya dengan Brigjen Helmi Santika di Mabes Polri.

Kepada wartawan (Senin,31/05) Menurutnya, berita tersebut adalah karangan Alvin Lim Pengacara Sutradara untuk menjatuhkan aparat penegak hukum di muka publik, ucapnya.

Masih kata Natalia Rusli, “Otak dibalik pertemuan tersebut adalah Pengacara Kondang Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm, fotonya bersama Brigjen Helmi Santika dia banggakan kemana-mana yang dia akui sebagai silahturahmi di Akun LQ Indonesia Law Firm Instagram dan Facebook.” tandas Natalia Rusli.

Natalia Rusli mengungkapkan”bahwa Alvin Lim kerap kali membuat berita dengan men-cropping foto-foto dan menyebarkan informasi HOAX di tengah masyarakat melalui media-media dalam beritanya tersebut,”tuturnya.

“Kepada ibu M dan VS harap bertanya mengenai pembahasan pertemuan dengan Brigjen Helmi Santika kepada Lawyer Alvin Lim sang ahli sutradara. Fotonya sudah saya lampirkan di berita, coba diperhatikan baik-baik Pengacara Alvin Lim yang duduk di pojok sambil mengenakan Seragam Kebanggaan LQ Indonesia Law Firm.” Kata Natalia Rusli

Natalia Rusli menambahkan dirinya selalu dijadikan topik utama Pengacara Kondang Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm, sehingga membuat dirinya bertanya-tanya ada apa dengan pengacara Alvin Lim dan dirinya tutup nya

(ML/IB/Red)

Connie Merugikan Nasdem

Oleh: Zeng Wei Jian



Kupang, mwartapedia.com – Connie menyebut “Mr. M” dan aneunya minta Kemenham aktif bongkar. Ketauan ga ngerti proses hukum. Mestinya yang nuduh yang harus membuktikan.

Kredibilitas Connie jato saat ngga tau Taiwan masi mengoperasikan Submarine Hai shih yang berusia 80 tahun.

Ngaku sebagai pengamat. Tapi kok tercatat sebagai Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Bareng Peter F Gontha. Di bawah Ketua Siti Nurbaya.

Ngaku akademisi kok ya obral gossip “Mr. M”. Alhasil ngga ada akademisi yang mau diskusi dengan-nya. Berakhir di podcast-podcast pasca-bayar berdasarkan jumlah “likes”.

Baru Tahun kemarin bolak-balik ngebet banget pingin jadi anggota Timlak KKIP. Nggak ke-sampai-an. Lalu ya gitu dech; uring-uringan kayak Dewa Mabok.

Diketahui sedari dulu punya ambisi jadi “Menteri Pertahanan”. Pernah stay bertahun di Israel. Ngaku riset tapi dikawal “Israel Defence Force”. Pulang-pulang jadi marketer Hubungan Israel-Indonesia. Mirip proxy dan “agen terbuka” Zionis. Entah adakah kursus regular freemason di Tel Aviv.

Rmol pernah angkat feature news: Connie dulu pengamat, sekarang pebisnis senjata. Menhan Prabowo dipertanyakan trus. Seolah “Dipaksa” buka rahasia pertahanan.

Menhan Prabowo ngga bisa rilis keputusan sepihak. Semua policy pertahanan adalah produk institusi. TNI salah satu anggotanya.

Jadi serangan terhadap Menteri Pertahanan sama artinya serangan terhadap institusi DoD.

Connie, Dewan Pakar Nasdem, IDF, Israel, Agent Terbuka, saling-mengait. Membentuk formasi kusut. Seakan acak. Tampak berdiri sendiri.

Intelijen Asing diketahui sering beroperasi di tanah Indonesia. Minimal infiltrasi. Obok-obok kedaulatan. Melemahkan rezim-rezim independent.

Seandainya Connie hidup di Era 1968an, mungkin dia masuk daftar yang dipantau Satuan Khusus Pelaksana Intelijen atau Satsus Pintel yang dibentuk Kolonel Nicklany. Satsus Pintel adalah Unit khusus yang handle kontrainTELijen asing dan menangkap mata-mata asing yang beroperasi di Indonesia.

Sisi paling negative dari ocehan Connie adalah Nasdem dirugikan. Bisa dituduh macam-macam. Entah gimana rasa Kader Nasdem bila Surya Paloh diserang "Anggota Dewan Pakar" partai koalisi. Sesama anggota kabinet saling down-grade.

Urusan Pilpres 2024 ngga bisa dijadikan alat merusak kedaulatan & pertahanan negara. Pilpres is just a game in democratic society.

Impact paling destruktif dari petualangan pribadi Connie; Kabinet melemah. Bisa end-up menjadi praxis Adu-domba sesama partai koalisi. Intelijen Asing (Israel?) ambil cela. Masuk. Obok-obok. Sehingga lebi mudah menekan Presiden Jokowi. Shortcut menumbangkan President adalah dengan menghancurkan Menteri Pertahanannya.

THE END (ML/IB)

Gus Tunggak Siap Selamatkan Garuda Bersama Rakyat Indonesia



Jakarta, mwartapedia.com – Salah satu putra terbaik bangsa, Budi Kasan Besari Adinegoro memberikan opsi strategi guna menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero). “Opsi terbaik, kembalikan ke pemerintah sebagai pemegang saham terbesar tentang status Garuda Airlines sebagai flag carrier,” ungkapnya dalam wawancara eksklusif kepada awak media di Jakarta, Jumat (28/05/2021) siang.

Sosok yang akrab dipanggil Gus Tunggak ini mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan para pihak penyelamat Garuda Airlines adalah mempertanyakan apakah Flag Carrier masih menjadi prioritas pemerintah, terutama dalam pembagian perencanaan koridor rute area nasional dan internasional.

“Bisa dibilang Flag Carrier tidak hanya mengudara membawa penumpang saja, tapi juga mengemban tugas lebih, yaitu membawa nama baik dan reputasi negara,” ucapnya.

Sebagai Flag Carrier, Garuda Airlines sangat layak mendapatkan hak istimewa untuk memberikan layanan kepada rakyat dan bangsa. “Porsi ini perlu menjadi prioritas, karenanya pemerintah patut mereformasi regulasi di Departemen Perhubungan yang notabene selama ini menjadi departemen teknis Garuda,” jelas Gus Tunggak.

Reformasi itu terkait penentuan rute yang semestinya dimiliki

Garuda, yakni untuk domestik semua Golden Route dan Best Time wajib untuk Garuda.

“Sedangkan untuk Internasionalnya, pemerintah meninjau kembali open sky policy yang memperbolehkan maskapai asing masuk ke negeri ini untuk tujuan berbagai destinasi domestik,” kata dia.

Destinasi tersebut hanya menjadi ranah Garuda Airlines seperti dilakukan negara luar yang menerapkan sistem one gate one country untuk masuk ke negaranya.

“Dengan cara seperti ini selain membantu mengontrol entry exit orang asing, juga berpihak ke Flag Carrier. Ini penting demi kedaulatan wilayah,” terang Gus Tunggak.

Selanjutnya langkah kedua perlu dilakukan untuk menyelamatkan Garuda Airlines adalah mewajibkan semua ASN, TNI/Polri yang biaya perjalanannya menggunakan APBN wajib menggunakan Flag Carrier.

“Bangun sinergi kebanggaan nasional dengan asset nasional yang dimilikinya,” kata Gus Tunggak.

Kedua langkah tersebut bila diprioritaskan maka dapat menjamin keberlangsungan Garuda sebagai asset yang mempersatukan kebanggaan nasional dan menjadi jembatan nusantara.

Adapun langkah ketiga perlu dilakukan adalah membantu Garuda Airlines, atau membackup Garuda Airlines dalam restrukturisasi hutang dan memberikan jaminan kepada semua vendor dan lessor yang terkait piutang melalui jaminan lembaga penjamin piutang bahwa uang mereka akan tidak hilang dan akan tetap dibayar dengan perhitungan menarik di masa mendatang.

“Nantinya pemerintah bersama Garuda Airlines membuat survival plan,” lanjut Gus Tunggak.

Mulai dari penggunaan dana talangan 8,5 triliun untuk memperkuat modal dan mendukung operasional, efisiensi sektor distribusi sales dengan menggabungkan sentra layanan dan sales

di Bandara, melakukan optimalisasi penjualan melalui sistem online, melakukan penundaan pembayaran fasilitas tunjangan jabatan untuk GHA Pilot, fasilitas COP struktural dan membuat perampingan organisasi.

“Banyak hal bisa ditempuh untuk menyelamatkan Garuda Airlines dari kebangkrutan,” jelas Gus Tungga.

Mengenal penyelamatan ini, dirinya yakin bersama rakyat Indonesia dapat membawa nama baik dan reputasi negara. (ML/IB)

Rayakan HUT Kodam IX/Udayana, 28 Orang Operasi Bibir Sumbing Gratis di RST Wira Sakti



Kupang, mwartapedia.com – Operasi bibir sumbing gratis yang dilaksanakan hari ini adalah dalam rangka menyambut HUT ke-64 Kodam XI/Udayana, sehingga Korem 161/Wira Sakti membuat program ini yang merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial.

“Hari ini yang kita laksanakan adalah Operasi bibir sumbing. Kita, Korem 161/Wira Sakti mencoba mencari pasien, apakah ada

saudara-saudara atau anak-anak kita yang punya permasalahan bibir sumbing. Hasilnya didapatkan 28 orang di wilayah kota kupang, TTS, TTU dan Belu penderita bibir sumbing,” kata Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, S.I.P., M.M.

Hal ini disampaikannya dalam sambutan mengawali pelaksanaan kegiatan Operasi Bibir Sumbing gratis untuk warga masyarakat kota kupang dan sekitarnya yang digelar Korem 161/Wira Sakti melalui Rumah Sakit Tentara (RST) Wira Sakti dalam rangka menyambut hari jadinya Kodam IX/Udayana Ke -64 tahun, Kamis (27/05/2021) di Rumah Sakit Tentara Kupang.

Komandan Korem 161/Wira Sakti menyampaikan juga pada saat Jumpa Pers di halaman Denkesyah bahwa pada saat ini sedang dilaksanakan bakti sosial, yaitu bakti sosial kesehatan berupa operasi bibir sumbing. Saat ini yang terdaftar untuk pasiennya baru 28 orang, direncanakan 1 hari untuk 10 orang pasien, sehingga kalau 28 orang nanti akan dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 3 hari.

Dokter kita sudah siap melaksanakan operasi kemanusiaan dalam hal ini bakti sosial kemanusiaan untuk membantu masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di kota Kupang sehingga masyarakat sehat, Kupang sejahtera dan Kupang sehat “tandasnya”.

Kegiatan ini didampingi Dandenkesyah 09.04.01 Kupang, Letkol Ckm. dr. Agus Saptiady, Sp. An, Karumkit TK III Wira Sakti Kabalak Aju Kodam dan para pejabat dari RST Wira Sakti, serta dihadiri juga oleh Ketua Tim Spesialis Bedah Plastik, dr. Arviansyah Sp.BP-RE beserta Tim Operasi Bibir Sumbing.
(Penrem161/WS).